PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau)

Oleh :
Rilian Pratama
Pembimbing : Yesi Mutia Basri dan Supriono

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : rilianpratama12@gmail.com

The Influence Of Local Revenues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund To Capital Expenditure With Economic Growth As A Moderating Variable (An Empirical Study On District / Municipal Governments In The Province Of Riau)

ABSTRACT

This research was aimed to examine empirically the effect of several factors to capital expenditure. These factors are Local Revenues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund To Capital Expenditure With Economic Growth As A Moderating Variable. The population that will be used in this research are districit/municipal governments in the Province Of Riau. The Method used was Purposive Sampling due to availability of data. Collecting data was conducted from governments financial statements from Central Bureau of Statistics. The method of data analysis in this study is use multiple liniear regression with SPPS version 21. The results of this study prove that local revenues, general allocation fund and special allocation fund significantly positive affect to capital expenditure. While economic growth is not moderate the relationship between local revenues and special allocation fund to capital expenditure at district/municipal in the Province of Riau. The Amount of R Square (R2) is 0.597 gives the sense that the rate is 59.7% of level capital expenditure can be explained by Local Revenues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth task while 40.3% can be explained by other variabels that are not tested in this study.

Keyword : Local Revenues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth

PENDAHULUAN

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, telah terjadi pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya

kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang juga diiringi dengan meningkatnya pendanaan dari pusat ke daerah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan tersebut. Salah satu tugas penting dari pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dan membangun infrastruktur publik. (Laporan Pelaksanaan *spending performance,* Kemenkeu, 2014).

Untuk melihat seberapa besar anggaran untuk pembangunan di daerah dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2014 bahwa persentase dari total belanja pemerintah daerah yang mana belanja modal lebih rendah dibandingkan dengan belanja operasi. Data yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada tabel 1 dibawah ini menunjukkan kondisi tersebut.

Tabel 1
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Di Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2014 (dalam jutaan rupiah)

Nama Daerah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	% Belanja Operasi	% Belanja Modal
Kab. Indragiri Hulu	204.166	1.593	205.759	99%	1%
Kab. Pelalawan	1.033.862	327.477	1.362.138	76%	24%
Kab.Kuansing	1.021.679	358.433	1.380.112	75%	25%
Kota Pekanbaru	1.695.021	647.098	2.342.869	72%	27%
Kab.Meranti	1.107.094	289.134	1.396.228	80%	20%

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.id, 2016.*

Dari beberapa fakta diatas dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja operasi, mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menganggarkan alokasi belanja modal untuk kepentingan sektor publik.

Meningkatkan pembangunan nasional seperti infrastruktur, sarana dan prasarana merupakan hal yang vital bagi pembangunan nasional. Pemerintah harus merubah kualitas anggaran yang digunakan untuk pembangunan daerah dan harus dilakukan secara adil dan merata (Fitri, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal? 2). Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal? 3.) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal? 4.) Apakah Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal? 5.) Apakah Pertumbuhan Ekonomi mampu memoder Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal? 6.) Apakah Pertumbuhan Ekonomi mampu memoder Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal. 2). Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal. 3.) Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal. 4.) untuk membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi pada hubungan pendapatan asli daerah dengan alokasi belanja

modal. 5.) untuk membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi pada hubungan dana alokasi umum dengan alokasi belanja modal. 6.) untuk membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi pada hubungan dana alokasi khusus dengan alokasi belanja modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Daerah

Menurut Freeman dan Shoulders (2003) dalam Nordiawan menyatakan bahwa penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Sementara itu, anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.

(Samuels, 2000) dalam Yovita (2011). Von Hagen (2002) dalam Ardhani (2011) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu executive planning, legislative approval, executive implementation, and ex post accountability. Pada tahapan executive planning dan legislative approval terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan executive implementation dan ex post accountability hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Novianto (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Menurut Rini (2014) variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal lebih baik. Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004). Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasser (2015) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan beberapa penelitian ini maka mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan PAD dan belanja modal.

Rini (2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Mampu memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.Sehingga semakin banyak jumlah penduduk, semakin luas wilayah maka alokasi dana alokasi umum tentu akan ditingkatkan dengan catatan bahwa PDRB daerah kecil. Dalam UU No. 25/ 1999, disebutkan pula tujuan dari alokasi DAU ini, yaitu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Oleh karena itu, daerah yang kurang mampu dari segi pembiayaan urusannya akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

Salah satu sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah adalah DAK. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H_4: Terdapat Interaksi PDRB dalam Hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

H5: Terdapat Interaksi PDRB dalam Hubungan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal

H6: Terdapat Interaksi PDRB

dalam Hubungan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014 : 115), Populasi (population) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling.*

Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Riau yaitu 10 kabupaten / kota karena telah memenuhi kriteria yang tersebut diatas. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10 kabupaten/kota dalam durasi 4 tahun sehingga total berjumlah 40 Sampel penelitian.

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Variabel Independen

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS).

Variabel Moderating

Menurut Sukirno (2013) Pertumbuhan ekonomi adalah Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi diproksi dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Bagian ini akan mendeskripsikan hasil statistic data (variabel) yang digunakan, dengan menjabarkan pergerakan variabel untuk seluruh periode yang menjadi acuan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau didalam arsip yang berasal dari Badan Pusat Statistik masing-masing kabupaten

dan kota serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah belanja modal.Sedangkan variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 40, yaitu 10 kabupaten dan kota selama periode 4 (empat) tahun.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	40	1593.98	2154123.10	588316.58	529049.47
DAK	40	.000000	54950.00	20601.07	14631.39
DAU	40	30913.00	809987.15	395447.78	198827.97
PAD	40	18114.80	440550.15	141288.21	108728.51
PDRB	40	-3.50	8.39	4.0003	3.06826
Valid N	40				

Sumber: *Data Olahan, 2016.*

Dari tabel 2 diatas, variabel dependen belanja modal memiliki nilai minimum sebesar Rp.1.593.981.778. yang terdapat pada Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2014 dan nilai maksimum terdapat pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 sebesar Rp.2.154.123.102.608. Nilai rata-rata belanja modal adalah Rp.588.316.589.599 dari 40 objek penelitian adanya perbedaan nilai belanja modal setiap tahun memberikan nilai standar deviasi sebesar Rp.529.049.478.074.

Variabel DAK memiliki nilai minimum sebesar Rp.0 pada tahun 2014 untuk Kota Dumai dan nilai maksimum terdapat pada Kabupaten Kampar pada tahun 2013 sebesar Rp.54.950.000.000. Nilai rata-rata DAK adalah sebesar Rp.20.625.079.975 dan standar deviasi untuk DAK sebesar Rp.14.623.399.822.

Berdasarkan tabel 2 diatas variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar Rp.30.913.000.000 yang terdapat pada Kabupaten Siak pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar Rp.809.987.156.000 pada tahun 2014 untuk Kota Pekanbaru. Nilai rata-rata DAU adalah sebesar Rp.395.447.785.525 dan standar deviasi untuk DAU sebesar Rp.198.827.973.522.

PAD untuk kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki nilai minimum sebesar Rp.18.114.807.432 pada tahun 2014 untuk Kabupaten Indragiri Hulu dan nilai maksimum terdapat pada tahun 2014 sebesar Rp.440.550.158.026 untuk Kota Pekanbaru. Nilai rata-rata PAD adalah sebesar Rp.141.288.219.445 dan standar deviasi untuk PAD sebesar Rp.108.728.518.949.

Laju Pertumbuhan ekonomi (PDRB atas harga dasar harga Konstan 2010) sebagai variabel moderasi memiliki nilai minimum sebesar -3.50% pada tahun 2014 untuk Kabupaten Bengkalis dan nilai maksimum sebesar 8.39% pada tahun 2012 untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Nilai rata-rata PDRB adalah sebesar 4 % dan standar deviasi adalah sebesar 3.06%.

Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi pada variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian data menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5 %. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu dengan melihat probabilitas *asymp.sig (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,05 maka data dapat dikatakan

berdistribusi normal dan jika *asymp.sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas adalah:

Tabel 3
Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	40
Kolmogorov-Smirnov Z	.114
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Sumber*: Data Olahan, 2016.*

Dari hasil pengujian tersebut nilai *Kolmogorov-Smirnov* yaitu 0,114 dan nilai signifikan pada 0,200 (> 0,05) yang berarti bahwa data residual berdistribusi normal.

Untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat pada grafik histogram diatas. Kita bisa melihat bentuk grafik belanja modal mengikuti bentuk distribusi normal. Selain menggunakan histogram, kita juga bisa melihat uji normalitas dengan menggunakan grafik P-P Plots.

Gambar 1
Grafik PP Plots Normalitas Data

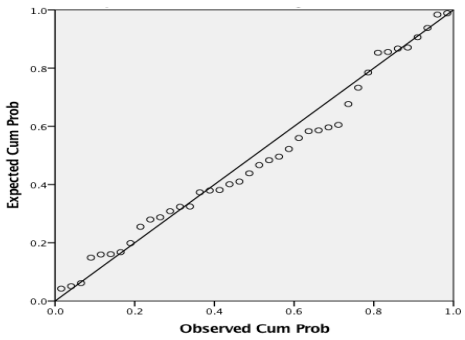

Sumber: *Data Olahan, 2016.*

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini ditunjukkan oleh gambar berikut:

Pengujian Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	0.800	1.249
DAU	0.535	1.868
DAK	0.914	1.094
PDRB	0.479	2.089

Sumber*: Data Olahan, 2016.*

Pada Tabel 4 terlihat bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan PDRB serta interaksi variabel independen terhadap variabel moderasi memiliki angka VIF jauh dibawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak ada terjadi multikolinieritas diantara variabel variabel independen.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedatisitas

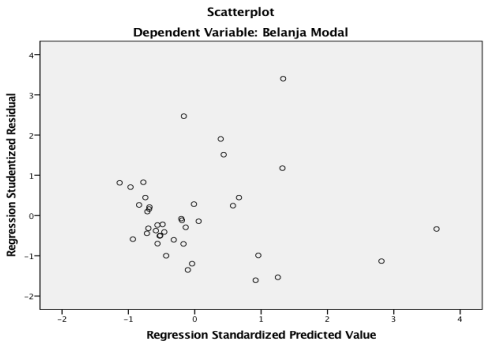

Sumber*: Data Olahan, 2016.*

Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui dan mendeteksi adanya autokorelasi. Autokorelasi dalam penelitian ini adalah menggunakan Durbin-Watson.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Diskriptif	Nilai *Durbin-Watson*	Keterangan
n=40, ∝= 0,05	1.869	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: *Data Olahan, 2016.*

Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa DW 1,869 artinya tidak ada autokorelasi antar variabel.

Hasil Analisis Regresi

Tabel 7
Hasil Persamaan Pertama (H1,H2,H3)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	597185	156828		3.808	.001
PAD	1.706	.524	.351	3.253	.002
DAU	-1.457	.290	-.548	-5.019	.000
DAK	15.838	3.959	.438	4.001	.000

Sumber*: Data Olahan, 2016.*

Dari hasil uji regresi, persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Y_1 = ß0 + ß1X1+ ß2X2+ ß3X3

Arti persamaan regresi diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 597185.222 mengindikasikan apabila pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sama dengan nol, maka belanja modal sebesar 597185.222
2. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 1.706 mengindikasikan apabila pendapatan asli daerah naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 1,706 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
3. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar – 1.457 mengindikasikan apabila dana alokasi umum naik satu persen, maka akan menurunkan belanja modal sebesar – 1,457 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
4. Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 15.838 mengindikasikan apabila dana alokasi khusus naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 15,838 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Tabel 8
Hasil Persamaan Kedua (H4,H5,H6)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	677745	311808		2.174	.037
PAD	.842	1.000	.173	.843	.406
DAU	-1.668	.558	-.627	-2.993	.005
DAK	25.133	6.356	.695	3.954	.000
PDRB	-53013	58918	-.307	-.900	.375
PAD*PDRB	.024	.180	.033	.132	.896
DAU*PDRB	.185	.097	.542	2.898	.027
DAK*PDRB	-2.770	1.373	-.497	-2.017	.152

Sumber: *Data Olahan, 2016.*

Dari hasil uji regresi, persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Y_2 = ß0 + ß1X1+ ß2X2+ ß3X3 + ß4Z + ß5(X1.Z) + ß6(X2.Z) + ß7(X3.Z) + e

Arti persamaan regresi diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 677745.962 mengindikasikan apabila PAD, DAU, DAK dan PDRB sama dengan nol, maka belanja modal sebesar 677745.962
2. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0.842 mengindikasikan apabila pendapatan asli daerah naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 0,842 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
3. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar – 1.668 mengindikasikan apabila dana alokasi umum naik satu persen, maka akan menurunkan belanja modal sebesar – 1,668 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
4. Nilai koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 25.133 mengindikasikan apabila dana alokasi khusus naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 25,133 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
5. Nilai koefisien regresi PDRB sebesar -53013.263 memiliki arti apabila PDRB naik sebesar satu persen, maka akan menurunkan pengalokasian belanja modal sebesar 5,3013263 persen.
6. Diketahui bahwa nilai koefisien moderat pendapatan asli daerah dengan PDRB sebesar 0.024 mengindikasikan bahwa setiap interaksi pendapatan asli daerah dengan PDRB meningkat satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada belanja modal sebesar 0,24 persen.
7. Diketahui bahwa nilai koefisien moderat dana alokasi umum dengan PDRB sebesar 0,185 mengindikasikan bahwa setiap interaksi dana alokasi umum dengan PDRB meningkat satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada belanja modal sebesar 0,185 persen.
8. Diketahui bahwa nilai koefisien moderat dana alokasi khusus dengan PDRB sebesar -2.770 mengindikasikan bahwa setiap interaksi dana alokasi khusus dengan PDRB meningkat satu persen akan mengakibatkan penurunan pada belanja modal sebesar 2,770 persen.

Pengujian dan Pembahasan Hipotesis

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap 6 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 hipotesis yang diterima dan dua lainnya ditolak.

1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (H1)

Dari Tabel 7 diketahui bahwa nilai t sebesar 3253 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002 < 0,05.

Hal ini memberikan indikasi kalau alokasi belanja modal pada pemerintah daerah di

Provinsi Riau ditentukan oleh pendapatan asli daerah yang diperoleh. PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan alokasi belanja modal sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (H2)

Dari Tabel 7 diketahui bahwa nilai tsebesar -5019 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Yovita (2011) yang mengatakan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal (H3).

Dari Tabel 7 diketahui nilai t sebesar 4001 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000< 0,05. berarti DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Hidayati (2016), Yasser (2015), Novianto (2015), Sumarmi (2013), Melasari (2012), Hartinigsih (2015), Sumarmi (2013) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAK dengan alokasi belanja modal.

4) Pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (H4).

Dari Tabel 8 diketahui bahwa nilai t sebesar 0.132 dan tingkat signifikansi sebesar 0,896 > 0,05..

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi daerah baik, akan tetapi tidak memiliki kontribusi terhadap hubungan PAD dengan belanja modal serta tidak dapat menjadi salah satu indikator pengalokasian PAD untuk belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Hidayati (2016), Melasari (2012) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan belanja modal.

5) Pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal (H5).

Dari Tabel 8 diketahui bahwa nilai t sebesar 2898 dan tingkat signifikansi sebesar 0,027 < 0,05. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut terpacu untuk lebih meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal (H6)

Dari Tabel 8 diketahui bahwa nilai t sebesar -2017 dan tingkat signifikansi sebesar 0,152 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi hubungan DAK terhadap belanja modal. Hal ini mengindisikan bahwa pengalokasian DAK yang bersifat *special grant* dari pemerintah pusat kepada daerah tidak memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi.

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Penelitian ini menggunakan R^2 (koefisien determinasi) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dan moderasi dalam mempengaruhi independen terhadap variabel dependen secara komprehensif.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Persamaan	R Square	Adjusted R Square
1	59.7	56.3
2	72.6	66.6

Sumber*: Data Olahan, 2016.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R^2 (koefisien determinasi) untuk persamaan 1 (sebelum dimoderasi) adalah sebesar 0,563 (56,3%). Hal ini menyatakan bahwa variabel naik turunnya Belanja Modal sebesar 56,3% ditentukan oleh PAD, DAU, DAK. Sedangkan sisanya sebesar 43,7% ditentukan oleh variabel lain.

Dari tabel diatas juga diketahui bahwa nilai adjusted R^2 (koefisien determinasi) untuk persamaan 2 (setelah dimoderasi) adalah sebesar 0,666 (66,6%). Hal ini menyatakan bahwa variabel naik turunnya Belanja Modal sebesar 66,6% ditentukan oleh PAD, DAU, DAK dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebagai variabel moderator. Sedangkan sisanya sebesar 33,4% ditentukan oleh variabel lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian atas hipotesis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik.
2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Daerah DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja operasi lainnya.
3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Artinya daerah yang mendapatkan DAK yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar, hal ini

4. karena pengggunaan DAK memang ditujukan untuk membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan alokasi belanja modal. Artinya walaupun pertumbuhan ekonomi daerah baik, akan tetapi tidak memiliki kontribusi terhadap hubungan PAD dengan belanja modal serta tidak dapat menjadi salah satu indikator pengalokasian PAD untuk belanja modal.
6. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh dana alokasi umum (DAU) dengan alokasi belanja modal. Artinya semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan DAU semakin besar sehingga belanja modal besar.
7. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara dana alokasi khusus (DAK) dengan alokasi belanja modal. artinya DAK yang bersifat *special grant* dari pemerintah pusat kepada daerah tidak memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain walaupun suatu daerah sudah mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ideal, pemerintah daerah masih mendapatkan DAK yang tetap, lebih atau berkurang dari pagu anggaran sebelumnya.

Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya agar menambah variabel untuk mengukur alokasi belanja modal.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan memperluas kabupaten dan kota yang akan diteliti sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan akan lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lainnya yang akan digunakan sebagai variabel moderasi yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

Nordiawan, Dedi, Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik.* 2014. Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Cetakan ke-18, Juli 2014. Alfabeta, Bandung.

Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* 2013. Rajawali Pers, Jakarta.

Fitri, Vella Kurniasih. 2012. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli*

Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal. E-Journal Universitas Riau, Vol 1, No.2, 16-18.

Ni Putu Dwi Eka Rini, *et al.* 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.* E-Journal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 7, No. 2, Mei: 1-7.

Novianto, Rico. Rafiudin Hanafiah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal.* Jurnal Ekonomi. ISSN: 2302-7169 Vol.4 No.1**,** 4-8.

Ratna, Ikhwani. 2014. *Sinergisitas APBD dalam mencapai visi misi Riau 2020.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.

Farah Marta Yovita. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Mu'ammar Yasser. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara

Nurin Hidayati. (2016). *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Dana Alokasi Umum Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.